



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. BUDIONO SUBAMBANG
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
3. NHK : 257044

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 268.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 A/T T32 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 22.475.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 23.414.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 90.260.602**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 934.649.602**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 934.649.602**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.